

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan adalah hal yang sangat penting dalam guna mengetahui kinerja keuangan yang telah dicapai dan untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah pada masa periode anggaran yang bersangkutan. Jadi tidak hanya pemerintah pusat yang harus bisa membuat laporan keuangan, tetapi pemerintah daerah, pemerintah kota, dan seluruh instansi dan lembaga pemerintahan juga harus mampu membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam penyampaian informasi atas kinerja pemerintah daerah pada periode tahun yang bersangkutan, menurut Darmawan dan Darwanis (2014) laporan keuangan pemerintah yang akan dipublikasikan ke masyarakat oleh pemerintah daerah harus bersifat terbuka dan mempunyai informasi yang benar dan valid sehingga laporan keuangan dapat dipahami dengan mudah oleh para penggunanya. Oleh karena itu dalam guna memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan, pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang bersifat akurat, relevan, dapat dipercaya, dan tepat waktu.

Menurut penelitian Harnoni (2016) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas kinerja keuangannya kepada para pengguna laporan keuangan tersebut dalam hal ini adalah masyarakat. Laporan keuangan

yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas harus mampu disajikan oleh pemerintah, dan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah telah mengandung informasi yang memenuhi kriteria karakteristik yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah”. Dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami merupakan karakteristik yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari badan pengawas keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan oleh pemeriksa keuangan yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TP), dan pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP). Ketika laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan (BPK), maka dapat diartikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya. Badan pemeriksa keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2017 yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan anggaran saldo lebih, laporan arus kas, laporan operasional, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2017 telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian. Namun, badan pemeriksa keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan (sumber : bpkad.jepara.go.id).

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jepara. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah menurut Purwanti dan Wasman (2014) merupakan kegiatan berfikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka yang harus jadi perhatian utama adalah kualitas dari orang-orang yang bersangkutan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yaitu para pegawai yang melaksanakan tugas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Menurut Yuliani dkk., (2010) peran audit yang masih lemah, sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan secara optimal dan rendahnya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh para penyusun laporan keuangan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas rendah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Abdulhadi (2018) menunjukkan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Purwanti dan Wasman (2014) dan Yuliani dkk., (2010) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu kapasitas sumber daya manusia. Dalam pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, organisasi perangkat daerah (OPD) harus mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Apabila karakteristik kualitas kapasitas sumber daya manusia yang disyaratkan diatas tidak dimiliki oleh sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi, maka dalam melaksanakan fungsi akuntansi akan terhambat, dan akan berdampak pada buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Yosefrinaldi (2013) dalam Harnoni (2016) menyatakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang rendah dapat disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang melakukan sistem akuntansi. Masalah teknis akuntansi bukanlah penerapan basis

akuntansi, yaitu bagaimana laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan, namun menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*) adalah hal yang lebih penting, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan menganalisis atau mendesain sistem akuntansi yang ada. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan di bidang akuntansi yang baik tidak dapat menjalankan kebijakan untuk melakukan aktifitas yang telah disebutkan diatas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Abdulhadi (2018) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sari(2014) dan Harnoni (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku sikap akuntan dalam menggunakan teknologi informasi untuk proses kerja secara elektronik, pengolahan informasi, pengolahan data, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar masyarakat bisa dengan mudah dan murah mengakses semua pelayanan publik. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah telah mengatur kewajiban pemanfaatan teknologi. Manfaat pemanfaatan teknologi informasi yaitu proses transaksi dipercepat, perhitungan yang akurat, penyimpanan data dengan jumlah yang besar.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wahyuni dkk., (2018) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Harnoni (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan sistem pengendalian internal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), yaitu kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, pengamanan terhadap aset negara, pelaporan keuangan yang handal merupakan tindakan dan kegiatan yang efektif dan efisien dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Opini yang diperoleh dari badan pemeriksa keuangan (BPK) dapat dijadikan indikator sederhana untuk menilai apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut berkualitas. Pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah tingkat baik buruknya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh seberapa baik sistem pengendalian internal diterapkan (Harnoni, 2016).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan (2018), Utama (2017), Darmawan dan Darwanis (2018), Harnoni (2016), Yusniyar dkk., (2016), Armel (2017) menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Nuryanto dan Afiah (2013) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Menurut Yusniyar dkk., (2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan secara baik, harus dilakukan dengan mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana kemampuan dalam mengontrol kebijakan keuangan dengan baik secara akuntabel, ekonomis, efektif, efisien, dan transparan adalah ciri dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Maka dari itu pemerintah telah menetapkan standar-standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang yang dihasilkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan tujuan dari diterapkannya standar akuntansi pemerintahan (Udiyanti dkk., 2014 dalam Ramadhan, 2018). Dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah mempunyai informasi keuangan yang baik, karena laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan standar-standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusniyar dkk., (2016), Armel (2017) menunjukkan standar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ramadhan (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu standar akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Erawati dan Abdulhadi (2018) tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Erawati dan Abdulhadi (2018) sebelumnya adalah pertama adalah variabel penelitian, dalam penelitian ini terdapat penambahan dua variabel independen yaitu penerapan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi pemerintahan. Penambahan variabel yang pertama adalah penerapan sistem pengendalian internal merupakan dimana pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Variabel kedua adalah penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang dimungkinkan ada pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan yang berfokus pada standar akuntansi pemerintahan yang mewajibkan setiap entitas pelapor, dalam hal ini

termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, transparansi, manajemen, dan evaluasi kinerja. Melalui standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat disusun laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggung jawabkan. Penyajian informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menentukan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Supaya laporan keuangan pemerintah daerah berisi informasi yang andal maka penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Perbedaan kedua dalam penelitian ini adalah objek penelitian, yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Jepara sedangkan penelitian sebelumnya yang dijadikan obyek adalah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti harus membatasi ruang lingkup pokok pembahasan untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Variabel independen yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi pemerintah.
2. Obyek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara yaitu salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berupa Badan dan Dinas.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?
4. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?
5. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?

2. Untuk mengetahui pengaruh positif kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?
3. Untuk mengetahui pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?
4. Untuk mengetahui pengaruh positif penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?
5. Untuk mengetahui pengaruh positif penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara?

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara
 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan untuk memperbaiki sekaligus menambah pengetahuan kompetensi sumber daya manusia khususnya pegawai di bidang keuangan instansi pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi pelengkap referensi mengenai pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti hal yang serupa, dan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi sumbangan konseptual.